

**PENGARUH PENGGUNAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM TERHADAP
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN**

Ardunan¹, Nurliana Nasution², Agus Seswandi³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Email: ardunandunan@gmail.com¹, nurliana@unilak.ac.id², agusseswandi@unilak.ac.id³

Abstract: *This research aims to analyze the influence of using the Cash Management System (CMS) on the accountability and transparency of financial management at the Riau Province Manpower and Transmigration Office. This research uses a quantitative approach with a causal research design to empirically test the relationships between variables. The sample in this study consisted of 141 respondents determined using the census method, so the entire population was used as the research sample. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents directly involved in financial management. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (SEM-PLS) method with the assistance of the SmartPLS application. The research results indicate that the use of CMS affects the improvement of financial management accountability and transparency, although some indicators for both variables still show relatively low average values, requiring managerial attention. This finding confirms that optimizing the use of CMS, improving human resource competency, and strengthening information technology infrastructure are strategic steps in enhancing accountable and transparent financial governance in government agencies.*

Keywords: *Cash Management System on Accountability and Transparency of Financial Management.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Cash Management System (CMS) terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas untuk menguji hubungan antar variabel secara empiris. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 141 responden yang ditentukan dengan metode sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan CMS berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas maupun transparansi pengelolaan keuangan, meskipun beberapa indikator pada kedua variabel masih menunjukkan nilai rata-rata yang relatif rendah sehingga memerlukan perhatian manajerial. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan CMS, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah.

Kata Kunci: Cash Management System Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan.

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin menguat seiring dengan agenda reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah. Reformasi ini tidak hanya berorientasi pada pembaruan administrasi negara, tetapi juga merupakan respons terhadap ekspektasi publik atas pelayanan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar. Kedua prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan etis sekaligus instrumen pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip ini diyakini mampu memperkuat legitimasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi mencerminkan keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga publik dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran negara. Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut pertanggungjawaban pejabat publik atas setiap keputusan dan tindakan yang berdampak pada pengelolaan sumber daya negara. Konsistensi penerapan kedua prinsip tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan. Dalam konteks ini, reformasi sistem pengelolaan keuangan menjadi suatu keniscayaan yang harus didukung oleh sistem yang akurat, cepat, serta mampu menjamin integritas data dan pelaporan keuangan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilar utama modernisasi pengelolaan keuangan publik. Sistem digital memungkinkan proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan dilakukan secara efisien serta dapat dipantau secara real-time. Instrumen seperti Cash Management System (CMS), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan contoh konkret inovasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sistem tersebut tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Dengan dukungan teknologi, pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat diwujudkan secara lebih optimal.

CMS merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong transaksi non-tunai dan pengelolaan kas pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sistem ini dirancang untuk mengelola arus kas masuk dan keluar secara terintegrasi, efisien, serta dapat dimonitor secara real-time. Fitur seperti pelacakan transaksi, otorisasi pembayaran elektronik, dan pelaporan otomatis menjadikan CMS mampu meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas transaksi keuangan pemerintah (Thamrin, Yamin, and Rodianto 2023). Dari sisi regulasi, penerapan CMS memiliki dasar hukum yang kuat melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan berbagai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang mendorong implementasi transaksi non-tunai di pemerintah daerah.

Secara empiris, penerapan CMS terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan. Studi oleh (Thamrin, Yamin, and Rodianto 2023) menunjukkan bahwa CMS berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern. Temuan serupa disampaikan oleh (Ulandari and Martiningsih 2025) yang menyatakan bahwa CMS berbasis aplikasi SISKEUDES mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, keberhasilan implementasi CMS tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, melainkan juga oleh faktor non-teknis seperti kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan efektivitas pengendalian internal (Nislandi and Munari 2023).

Keterbukaan informasi dan kompetensi aparatur merupakan faktor determinan dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang substantif. Transparansi tidak cukup dimaknai sebagai ketersediaan data keuangan, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan, dan relevansi informasi bagi publik. Informasi yang sulit diakses atau terlalu teknis berpotensi menciptakan transparansi semu (Parhusip and Girsang 2023). Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparatur sering menjadi hambatan optimalisasi sistem digital. Selain itu, komitmen pimpinan dan budaya organisasi yang menjunjung integritas menjadi kunci keberhasilan reformasi tata kelola keuangan, agar akuntabilitas tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga melekat dalam praktik keseharian.

Sebagai OPD strategis di Provinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengelola anggaran yang signifikan dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Data realisasi anggaran tahun 2015–2023 menunjukkan kinerja yang fluktuatif dan belum optimal (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 2024), yang mengindikasikan perlunya penguatan

sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan. Dalam konteks ini, penerapan CMS menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Cash Management System terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antarvariabel penelitian. Desain kausalitas dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat serta menguji kekuatan hubungan antarvariabel secara empiris. Penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Tahap persiapan penelitian dilakukan pada Juni hingga Juli 2025, mencakup penyusunan proposal, pengembangan dan validasi instrumen, serta pengurusan perizinan. Tahap penyusunan tesis dilaksanakan pada Oktober hingga November 2025 dengan pertimbangan kompleksitas penelitian, jumlah responden, serta ketersediaan waktu analisis dan kesesuaian dengan kalender akademik.

Populasi penelitian meliputi seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang berjumlah 141 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus atau sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan responden penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berkaitan dengan variabel Cash Management System, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan. Data sekunder diperoleh

dari dokumen resmi instansi, laporan kinerja keuangan, jurnal ilmiah, buku teks, data Badan Pusat Statistik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan informasi.

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square menggunakan aplikasi WarpPLS 8.0. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, simpangan baku, serta distribusi jawaban responden. Selanjutnya, PLS-SEM digunakan untuk menguji hubungan struktural antarvariabel laten secara simultan. Evaluasi model mencakup pengujian measurement model melalui validitas dan reliabilitas indikator, serta structural model melalui uji kecocokan model, koefisien jalur, dan koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen untuk menentukan arah dan kekuatan pengaruh antarvariabel penelitian secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai estimasi untuk hubungan antara jalur dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini diperoleh dengan prosedur bootstrapping. Melihat signifikansi pada hipotesis dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic pada algoritma bootstrapping report, nilai signifikan dilihat dari:

- 1) Nilai t statistic, yang kita bandingkan dengan nilai t table untuk menguji berpengaruh signifikan atau tidaknya variabel eksogen terhadap endogen, adapun nilai t-table pada alpha 0.05 (5%) = 1.973.
- 2) Nilai p value, untuk dibandingkan apakah nilainya berada dibawah significance level, misalnya dibawah 0.05 atau diatas 0.05 untuk menyatakan apakah hipotesis

null atau hipotesis alternative yang diterima atau ditolak.

- 3) Original sampel, digunakan sebagai nilai koefisien regresi, untuk melengkapi persamaan regresi

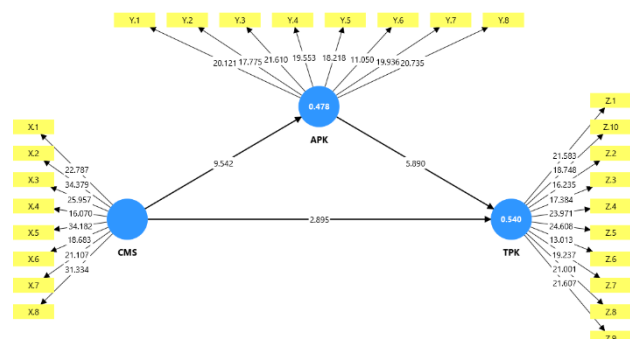
Adapun Hasil pengujian Estimasi Koefisien Jalur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Koefisien Jalur

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
APK → TPK	0.507	0.511	0.086	5.890	0.000
CMS → APK	0.691	0.689	0.072	9.542	0.000
CMS → TPK	0.287	0.284	0.099	2.895	0.004
CMS → APK → TPK	0.350	0.353	0.077	4.569	0.000

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat pengaruh antar variabel yang diteliti. Sementara itu, jika dilihat dari grafik hubungan antar variabel yang diteliti dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2. Jalur Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan hasil estimasi model struktural, diperoleh sejumlah temuan empiris yang menunjukkan bagaimana hubungan antarvariabel penelitian terjalin secara signifikan. Setiap hubungan diuji melalui parameter path coefficient, nilai statistik t, serta tingkat signifikansinya. Secara umum, seluruh hipotesis menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95% maupun 99%, yang tercermin dari nilai p-value < 0,05.

Penggunaan cash management system berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Koefisien jalur (O) sebesar 0.507, dengan nilai t-statistics 5.890, serta p-value 0.000, menegaskan bahwa pengaruh tersebut signifikan. Nilai t-statistics jauh melampaui batas minimal 1,996, yang berarti hipotesis diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan, semakin meningkat tingkat transparansi pengelolaan keuangan. Secara substantif, hal ini mencerminkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan dapat diverifikasi akan memperkuat kejelasan informasi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan suatu entitas.

Temuan ini menegaskan bahwa CMS tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi telah menjadi mekanisme strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan pemerintah. CMS memungkinkan proses pengelolaan kas dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi, sehingga meningkatkan kejelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kondisi ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan dan andal kepada masyarakat (Mardiasmo 2018). Dengan demikian, hipotesis pertama memperoleh dukungan empiris yang kuat.

Secara teoretis, CMS dipahami sebagai sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas sekaligus memperkuat fungsi pengawasan internal. Pencatatan transaksi secara elektronik dan real-time meminimalkan kesalahan manual serta menyediakan audit trail yang memudahkan proses monitoring dan verifikasi (Thamrin et al.

2023). Penguatan akuntabilitas ini juga dapat dijelaskan melalui Agency Theory, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling 1976). Selain itu, transaksi non-tunai yang difasilitasi CMS menghasilkan jejak digital yang sulit dimanipulasi, sehingga berkontribusi pada pencegahan penyimpangan dan penguatan pengawasan keuangan (Jamil 2024).

Temuan penelitian ini selaras dengan prinsip Good Governance yang menempatkan akuntabilitas sebagai elemen utama tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP 1997). CMS mendukung prinsip tersebut melalui penyediaan data keuangan yang presisi, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan CMS mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah (Agustini & Rai 2020). Namun demikian, masih terdapat indikator CMS dan akuntabilitas yang kontribusinya relatif rendah, sehingga optimalisasi sistem perlu terus dilakukan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan fitur CMS secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas secara berkelanjutan.

Penggunaan cash management system berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Koefisien jalur sebesar 0.691, dengan nilai t-statistics 9.542, mengindikasikan hubungan yang sangat signifikan. Dengan p-value 0.000, hipotesis diterima dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Pengaruh positif ini menggambarkan bahwa implementasi Cash Management System yang baik mampu

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Cash Management System (CMS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Sistem digital yang mengelola arus kas secara terintegrasi ini terbukti mampu meningkatkan keterbukaan informasi dibandingkan mekanisme manual. Transparansi tercermin dari tersedianya data keuangan yang terdokumentasi, dapat ditelusuri, dipantau, dan diverifikasi, sehingga hipotesis kedua memperoleh dukungan empiris yang kuat dan selaras dengan konsep governance modern yang menempatkan keterbukaan sebagai fondasi akuntabilitas publik.

Secara teoretis, transparansi pengelolaan keuangan dimaknai sebagai keterbukaan informasi terkait penggunaan sumber daya publik sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. CMS berperan strategis dalam mendukung prinsip tersebut karena seluruh transaksi dicatat secara digital dan terstandarisasi. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi bertujuan menyediakan informasi yang memadai agar publik dapat menilai kinerja pemerintah secara akurat. Pencatatan transaksi secara real-time melalui CMS memungkinkan evaluasi anggaran dilakukan secara objektif, sekaligus menyediakan bukti digital yang konsisten dan mudah ditelusuri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agustini & Rai (2020) yang menyatakan bahwa penerapan transaksi non-tunai melalui CMS mempercepat penyampaian informasi keuangan dan menekan risiko manipulasi data. Dari perspektif Good Governance Theory, transparansi merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP, 1997), sedangkan Agency Theory menjelaskan transparansi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi antara

agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dukungan empiris juga diperkuat oleh Ulandari & Martiningsih (2025) serta Thamrin et al. (2023) yang menegaskan bahwa CMS menyediakan akses data keuangan yang cepat, terstruktur, dan mudah diverifikasi.

Meskipun CMS terbukti meningkatkan transparansi, penelitian ini menemukan beberapa indikator CMS dan transparansi yang kontribusinya relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas CMS sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan fitur sistem, serta budaya organisasi yang mendukung keterbukaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan integrasi sistem, dan pendampingan teknis menjadi langkah penting agar CMS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan dan berintegritas.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Koefisien jalur sebesar 0.287, dengan t-statistics 2.895, serta p-value 0.004, menunjukkan bahwa pengaruh CMS terhadap TPK bersifat signifikan. Karena nilai t-statistics melebihi nilai t tabel (1,996), maka hipotesis diterima. Hasil pengujian empiris menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran akan diikuti oleh meningkatnya keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik menuntut pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya transparansi yang bermakna dalam tata kelola keuangan pemerintah.

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga mencakup integritas dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ketika aparatur pemerintah menjalankan mekanisme pertanggungjawaban secara konsisten, instansi akan lebih siap membuka informasi secara transparan kepada publik. UNDP (1997) menegaskan bahwa transparansi hanya akan efektif apabila didukung oleh akuntabilitas yang kuat, karena keterbukaan tanpa jaminan keandalan informasi berpotensi menimbulkan mispersepsi dan menurunkan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan Good Governance Theory yang memandang akuntabilitas sebagai penjamin validitas informasi, sementara transparansi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa organisasi dengan tingkat akuntabilitas tinggi cenderung lebih transparan karena minimnya kekhawatiran terhadap kesalahan prosedur atau penyimpangan. Studi empiris sebelumnya turut memperkuat hasil ini, seperti penelitian Ulandari dan Martiningsih (2025) serta Thamrin et al. (2023), yang menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang baik dan pengendalian internal yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan transparansi. Dalam konteks Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), akuntabilitas berperan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Penggunaan cash management system berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi melalui akuntabilitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Efek mediasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.350, dengan t-statistics 4.569, dan p-value 0.000, sehingga hipotesis diterima. Temuan ini menegaskan bahwa APK berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara CMS dan TPK. Artinya, sebagian besar pengaruh CMS terhadap transparansi disalurkan melalui peningkatan akuntabilitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan, yang menunjukkan bahwa CMS tidak hanya berdampak langsung terhadap transparansi, tetapi juga memperkuat keterbukaan informasi melalui peningkatan mekanisme pertanggungjawaban. Temuan ini menegaskan peran teknologi digital dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih terstruktur, akurat, dan dapat diaudit. Sejalan dengan reformasi birokrasi, CMS menjadi instrumen modernisasi pengelolaan keuangan yang mendukung integritas dan akuntabilitas publik secara berkelanjutan.

CMS merupakan sistem pengelolaan arus kas berbasis teknologi informasi yang memastikan seluruh transaksi tercatat secara real-time, terverifikasi, dan terdokumentasi dengan baik. Keberadaan CMS tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban pengelola keuangan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara sah dan tepat. CMS

menyediakan data transaksi yang akurat dan mudah ditelusuri, sehingga memperkuat akuntabilitas internal maupun eksternal. Ketika akuntabilitas didukung oleh sistem digital yang andal, proses transparansi menjadi lebih kredibel, tepat waktu, dan dapat diverifikasi oleh auditor serta publik.

Hubungan mediasi akuntabilitas dalam pengaruh CMS terhadap transparansi sejalan dengan Good Governance Theory (UNDP, 1997) dan Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976). CMS memperkuat akuntabilitas melalui audit trail digital, pelaporan tepat waktu, dan kepatuhan prosedural (Thamrin et al. 2023), sehingga mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan Ulandari dan Martiningsih (2025) juga menunjukkan bahwa CMS yang terintegrasi mampu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Namun, efektivitas hubungan ini bergantung pada optimalisasi pemanfaatan CMS dan penguatan indikator akuntabilitas. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis dan kelembagaan menjadi kunci peningkatan transparansi keuangan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Cash Management System (CMS) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena mampu memperkuat pengendalian internal, meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai regulasi.
2. Penggunaan CMS juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan, melalui penyediaan pencatatan dan

pelaporan berbasis real-time yang memudahkan akses informasi, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan potensi manipulasi.

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi, karena pertanggungjawaban yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan meningkatkan kredibilitas informasi serta efektivitas keterbukaan kepada publik.
4. CMS secara tidak langsung meningkatkan transparansi melalui akuntabilitas, dengan memastikan pencatatan, pengendalian, dan pelaporan transaksi berjalan tertib, sehingga informasi keuangan dapat disajikan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diverifikasi oleh publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat dirumuskan secara terpadu. Bagi peneliti, temuan ini membuka peluang pengembangan kajian lanjutan dengan memperluas objek penelitian, memperdalam indikator CMS, akuntabilitas, transparansi, serta menggunakan pendekatan longitudinal dan komparatif. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disarankan untuk memperkuat pengelolaan keuangan berbasis CMS melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penataan mekanisme pertanggungjawaban dan partisipasi publik. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan regulasi yang konsisten untuk mendorong integrasi teknologi, penguatan pengendalian internal, dan pemberian insentif atas praktik transparansi. Sementara itu, bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori, model konseptual, riset interdisipliner, serta

pengayaan kurikulum di bidang keuangan publik dan tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial least square (PLS): Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Agustini, I. G. A. A. S., & Rai, A. A. G. (2020). Implementasi transaksi non tunai (non-cash) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Widya Publika*, 8(2), 193–202.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023*. Pekanbaru.
- Ferdinand, A. (2016). *Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (PLS)*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Jamil, S. (2021). Pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Banda Aceh. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 3(1), 1–15.
- Kock, N. (2011). Using WarpPLS in e-collaboration studies: Descriptive statistics, settings, and key analysis results. *International Journal of e-Collaboration*, 7(2), 1–18.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. (2023). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 136–154. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2462>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thamrin, M. H., Yamin, A., & Rodianto. (2023). Pengaruh penerapan aplikasi cash management system terhadap penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 9915–9924. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3319>
- Ulandari, B. D., & Martiningsih, R. S. P. (2025). Penerapan Siskeudes berbasis cash management system dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. *Solusi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 95–107.